Syaiful Arif

FALSAFAH KEBUDAYAAN PANCASILA

NILAI DAN KONTRADIKSI SOSIALNYA

Kata Pengantar : Yudi Latif, Ph.D

Penulis Mahakarya "**Negara Paripurna**"

Falsafah Kebudayaan Pancasila

Falsafah Kebudayaan Pancasila

Nilai dan Kontradiksi Sosialnya

Syaiful Arif

Pengantar:

Yudi Latif, Ph.D

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Falsafah Kebudayaan Pancasila
Nilai dan Kontradiksi Sosialnya
oleh
Syaiful Arif

GM 616222010

Jl. Palmerah Barat 29 – 37
Jakarta 10270

Desain sampul: Isran Febrianto
Desain isi: Ayu Lestari

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh PT Gramedia Pustaka Utama
Anggota IKAPI, Jakarta 2016

ISBN: 978-602-03-2590-3

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Untuk

Verena dan Bundanya, Ria Rohmah

Daftar Isi

Prakata Penulis

Buku ini awalnya merupakan karya tulis untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada tahun 2012. Judul aslinya adalah *Dasar Kebudayaan dan Demokrasi Perspektif Pancasila*. Penulis mengajukan karya tulis ini untuk kategori masyarakat umum dengan mengambil sub-tema, *Pancasila sebagai pendorong kemajuan bangsa*. Alhamdulillah, karya tulis ini menyabet Juara I untuk Kategori Masyarakat Umum.

Dengan demikian, dasar kebudayaan dan demokrasi yang penulis elaborasi dalam karya tulis ini merupakan dasar bagi kemajuan bangsa. Tentu kemajuan bangsa itu didasari oleh nilai-nilai Pancasila yang penulis rumuskan dalam khazanah kebudayaan dan demokrasi.

Gayung bersambut. Sebetulnya penulis sudah lama ingin menulis buku tentang *demokrasi permusyawaratan* perspektif Pancasila. Hanya saja, apatisme atas Pancasila ternyata

masih menyelip di benak penulis secara implisit. Apakah benar Pancasila yang lima sila bercerai-berai, pinjam istilah Sutan Takdir Alisjahbana itu, bisa sakti menjadi dasar bagi demokrasi deliberatif? Penulis masih sangsi.

Hanya saja, sejak awal penulis memang tertarik dengan ungkapan Soekarno, *ketuhanan yang berkebudayaan*. Ungkapan itu, "penulis banget". Artinya, ia mewakili dasar pemikiran kebudayaan yang selama ini penulis pahami dan perjuangkan. Kebudayaan adalah kemanusiaan. Kemanusiaan adalah kebudayaan. Menariknya, Soekarno dan Pancasila menghadirkan Tuhan di sana. Di perhelatan manusia untuk memanusiawikan kehidupan. Karena itu, semakin terpesona penulis atas ungkapan Soekarno ini, dan penulis mendapat amunisi untuk menghantam lawan-diskursif penulis, yakni para fundamentalis pembela "kerajaan Tuhan" yang tak paham kebudayaan, yang tak paham ketuhanan berkebudayaan.

Lomba karya tulis empat pilar MPR itu pun menjadi kesempatan emas bagi penulis untuk menghabiskan waktu, menulis *ketuhanan yang berkebudayaan* serta *demokrasi permusyawaratan*. Dengan demikian, perjuangan *ketuhanan yang berkebudayaan* dan *demokrasi permusyawaratan* telah dimulai di titik ini.

Secara mendasar penulis haturkan terima kasih kepada sahabat, orangtua, dan guru yang telah menginspirasi,

membimbing, dan mengulurkan tangan di tengah ladang kesulitan. Kepada Dr. H. As'ad Said Ali yang telah berkenan menjadi orangtua, pembimbing, dan guru. Kepada Yudi Latif, Ph.D yang bersedia menulis pengantar untuk naskah ini. Kepada Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D yang menggelarkan penelitian gerakan-gerakan Islam. Juga kepada Dr. Robertus Robet yang setia menemani diskusi.

Demikian pula kepada teman-teman di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), NU Online, Pesantren Ciganjur, Pascasarjana STAINU Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, serta Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Agama RI.

Tentu, terima kasih kepada istri tercinta, Ria Rohmah yang telah menemani setiap hari dengan kasih sayang yang tiada habis ditelan zaman. Apalagi setelah kini memiliki buah hati, Najmu Verena Qalby, yang menceriakan hari. Untuk orangtua, Hj. Sri Mulyati-H. Karmono dan Bapak Zainudin-Ibu Sumiati, di mana semua doa dan cita-cita memuara.

Demikian. Semoga karya ini mendapatkan tempat di hati pembaca.

Bekasi, 22 Desember 2015
Syaiful Arif

Kata Pengantar

Pancasila dan Kebudayaan

Yudi Latif

Bung Karno berulang kali menolak dirinya disebut sebagai pencipta Pancasila. Dengan segala kerendahan hati ia mengatakan, "Saya sekadar penggali Pancasila daripada bumi tanah-air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia". Menggali nilai-nilai Pancasila dari bumi Indonesia sendiri berarti nilai-nilai kebudayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang telah mengalami pribumisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila harus dipandang sebagai *habitus* yang mencerminkan sekaligus membentuk *Weltanschauung* (pandangan dunia) kolektivitas keindonesiaan. Sebagai pandangan dunia, Pancasila merupakan "sistem pemaknaan" (*signification*) yang dalam pandangan Clifford Geertz dinisbatkan sebagai jantung kebudayaan.

Oleh karena itu, menempatkan Pancasila dalam tilikan falsafah kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat esensial. Meski demikian, tidak banyak buku yang secara serius membedahnya, tertimbun oleh kebanyakan buku yang memahami Pancasila dalam kerangka falsafah politik dan kenegaraan. Di tengah kelangkaan seperti itu, saudara Syaiful Arif memberikan kontribusi penting dengan menulis buku ini, yang mencoba menawarkan gagasan untuk mendekati Pancasila sebagai falsafah kebudayaan.

Penulis berangkat dari tradisi filsafat kebudayaan untuk merumuskan filsafat kebudayaan Pancasila. Berpijak dari ungkapan Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 tentang prinsip ketuhanan Pancasila yang merujuk pada *ketuhanan yang berkebudayaan*; penulis buku ini kemudian memahami dua hal. *Pertama*, prinsip ketuhanan di dalam Pancasila ialah *ketuhanan yang berkebudayaan*. Artinya, segenap iman dan pengamalan atas iman itu mesti diwujudkan dalam amal-amal kebudayaan. *Kedua*, yang dimaksud kebudayaan di sini adalah kemanusiaan, maka sila Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab merupakan poros dari kebudayaan Pancasila. Oleh karena itu, prinsip utama dari *ketuhanan yang berkebudayaan* adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang mempraksis dalam perjuangan kerakyatan dan keadilan dalam bingkai persatuan.

Dari pemahaman ini kita pun bisa mendapatkan dua pemahaman. *Pertama*, penulis ingin mengkritik paham ketuhanan umat beragama yang tidak berkebudayaan. Paham ini merupakan kesadaran awam kaum beragama yang terjebak dalam ritualisme formal minus kesadaran kemanusiaan. Juga keyakinan ideologis kaum fundamentalis yang membenturkan agama dengan budaya. Bagi yang terakhir ini, agama adalah "risalah Tuhan" yang turun dari langit. Tujuannya untuk mendirikan *civitas Dei* (kerajaan Tuhan) dengan tatanan ekslusif yang meniadakan kreasi manusia. Akibatnya, Islam dibenturkan dengan kebudayaan, dengan anggapan bahwa kebudayaan itu cenderung menodai kemurnian agama. Pada praktik keagamaan, penodaan kemurnian ini menghasilkan "agama sinkretik" seperti akulturasi Islam dan tradisi Jawa. Pada bangunan kenegaraan, penodaan ini menghasilkan sekularisasi: pengusiran agama dari politik.

Dengan demikian, prinsip *ketuhanan yang berkebudayaan* ialah prinsip ketuhanan yang berkemanusiaan. Artinya, penulis memprihatinkan tercerabutnya agama dari kema-

nusiaan. Padahal *concern* kemanusiaan itu justru merupakan nilai-nilai universal keagamaan. Islam, misalnya, memiliki tradisi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang ada di dalam *maqashid al-syari'ah*. Di banyak ayat Al-Qur'an, Allah telah memuliakan manusia dengan penciptaan sebaik-baik bentuk (*ahsanu taqwim*) dan akhirnya mendaulatnya sebagai *khalifah* di muka bumi (SQ 2:32). Oleh karenanya, pemisahan agama dan manusia bersifat kontradiktif dengan pemuliaan Al-Qur'an atas manusia.

Dalam praktiknya, kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila adalah kemanusiaan praksis. Ia tidak berpijak dari humanisme abstrak yang akhirnya hanya memuliakan individu di dalam kerangka kapitalisme. Humanisme Pancasila merujuk pada humanisme sosial-komunitarian, yakni pemuliaan kemanusiaan yang mempraksis di dalam upaya penciptaan keadilan sosial demi kebaikan masyarakat. Penulis berulang kali mengamini tesis Soekarno-Hatta bahwa "sifat sosial" merupakan nilai intrinsik yang menjiwai sila-sila Pancasila. Nasionalisme, misalnya, merupakan *sosio-nasionalisme* yang tidak memperjuangkan kebangsaan dalam "awang-awang", tetapi berakar pada keprihatinan akan nasib masyarakat. Demikian pula *sosio-demokrasi* yang mempraksiskan demokrasi tidak hanya demi "keberesan politik", tetapi juga "keberesan rejeki".

Kedua, dengan mendasarkan kebudayaan pada kemanusiaan, buku ini telah mengkritik pembatasan kebudayaan hanya di dalam karya seni, artefak sejarah, dan ritus lokal tradisional. Pada tiga ruang ini, kebudayaan adalah benda dan praktik di masyarakat. Namun, banyak orang yang melupakan hakikat kebudayaan itu sendiri yang ada sebelum ia menjadi benda artistik maupun praktik kultural. Hakikat itu adalah humanisasi, yang oleh penulis buku ini didefinisikan sebagai upaya *manusia memanusiwikan dirinya melalui pemanusiaan kehidupan*. Dengan demikian, baik budaya artistik maupun praktik kultural merupakan praksis dari humanisasi tersebut.

Dalam kaitan ini, Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan itu, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang oleh buku ini didaulat sebagai hakikat kebudayaan Pancasila. Pada titik ini, humanisasi mengarah pada dua hal. *Pertama*, kemanusiaan berkeadilan. *Kedua*, kemanusiaan berkeadaban. Yang pertama terkait dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Yang kedua terkait dengan sila Persatuan Indonesia. Artinya, humanisasi Pancasila adalah humanisasi yang memuara pada penciptaan struktur masyarakat berkeadilan. Poin ini merupakan "bentuk", jika kemanusiaan menjadi "isi". Sementara itu, Persatuan Indonesia merujuk pada keadaban masyarakat Indonesia yang mampu merawat kemajemukan bangsa dalam kehar-

monisan yang beradab. Oleh karena itu, perhargaan atas kemajemukan merupakan prasyarat bagi terbentuknya keadaban masyarakat. Menariknya, semua bentuk keadilan dan keadaban ini diterangi oleh nilai ketuhanan yang menyelamatkan kebudayaan Pancasila dari jebakan sekularisasi.

Kritik Kebudayaan

Dengan menempatkan Pancasila sebagai falsafah kebudayaan, buku ini melontarkan kritik kebudayaan berbasis Pancasila. Kebudayaan di sini diartikan sebagai corak umum kehidupan. Meminjam definisi Francis Mulhern, kebudayaan adalah totalitas kehidupan simbolik dalam wilayah sosial kita (2010: xv). Kehidupan simbolik yang dimaksud adalah segenap tata kehidupan yang sudah dibalut oleh simbol-simbol modernitas. Oleh karenanya, kritik kebudayaan di sini diartikan tidak hanya dalam kerangka *cultural studies* tetapi juga *kulturkritik*. Kritik *cultural studies* tertembak pada budaya pop (*pop culture*) besutan industri budaya. Sementara *kulturkritik* menembakkan kritik ke "jantung patologis" penyakit modernitas.

Patologi modernitas yang jadi sasaran kritik buku ini terletak pada apa yang penulis sebut sebagai *perubahan basis material kebudayaan*, yakni perubahan nilai-nilai budaya akibat perubahan basis material masyarakat. Tentu perubahan basis material ini merujuk pada perubahan sistem

sosial dan sistem perilaku akibat "materialisasi kehidupan". Ekonomisme dan nalar instrumental adalah penggerak dari materialisasi ini yang menempatkan semua elemen strategis kehidupan sebagai alat demi pemenuhan hasrat ekonomis.

Perubahan basis material kehidupan ini kemudian berimbas pada ranah politik, yakni raibnya ruang publik oleh ruang privat dan kolonisasi sistem atas *Lebenswelt*. Situasi pertama dirujukkan pada kritik Hannah Arendt, sedangkan yang kedua dibasiskan pada kritik Jurgen Habermas atas modernitas.

Di dalam situasi pertama, ruang publik, yakni ruang bersama tempat manusia mengartikulasikan tindakan (*action*) demi kebaikan bersama (*res publica*), telah raib akibat ekspansi ruang privat (*res privata*). Hal ini terkait dengan kemenangan manusia pekerja (*animal laborans*) atas manusia pencipta (*homo faber*). Manusia pekerja adalah corak manusia yang memaknai kerja hanya dalam kerangka pemenuhan kebutuhan ekonomis. Manusia pekerja inilah yang sayangnya menjadi politikus yang akhirnya menempatkan politik sebagai "rumah tangga nasional". Artinya, negara disulap menjadi "lumbung padi" tempat para politikus mengisi penuh periuk dapurnya. Raibnya ruang publik akibat ruang privat ini terjadi dalam pragmatisme politik yang menjangkiti keseharian politik lokal-nasional kita.

Sementara itu, kolonilasasi sistem atas dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) merujuk pada pembacaan Habermas atas patologi modernitas. Dalam situasi ini, sistem yang merupakan pengaturan sosial modern berbasis rasionalitas instrumental telah mengoloni dunia-kehidupan, tempat manusia merayakan nilai dalam rasionalitas komunikatif. Oleh karenanya, kolonisasi ini juga bisa dipahami dalam kerangka penjajahan nalar instrumental atas nalar komunikatif. Seperti termaktub di atas, nalar instrumental adalah nalar strategis yang menempatkan semua hal dan proses berpikir itu sendiri sebagai alat bagi pemenuhan keuntungan yang cenderung ekonomis. Sementara itu, nalar komunikatif merupakan nalar-budi yang digunakan manusia untuk saling memahami dan menciptakan konsensus. Nalar instrumental telah menciptakan sistem, sedangkan nalar komunikatif telah membentuk ruang publik, tempat masyarakat sipil berusaha mengimbangi negara.

Dalam kaitan ini, demokrasi Pancasila, yakni *demokrasi permusyawaratan* dibaca penulis melalui tradisi demokrasi deliberatif Habermasian. Sebuah tradisi demokrasi yang ingin menegakkan "demokrasi langsung" di dalam "demokrasi perwakilan". Caranya, melalui penyambungan kembali sistem dan *Lebenswelt*. Meskipun tidak dibarengi dengan data-data pemerintahan berbasis studi komparasi politik, buku ini telah merekomendasikan dihidupkannya kembali "utusan golongan" di dalam parlemen. Tentu "utusan go-

longan" di sini tidak dalam *mindset* Orde Baru, tetapi dalam semangat reformasi. Utusan golongan yang dimaksud adalah utusan dari golongan-golongan masyarakat sipil, seperti golongan buruh, nelayan, petani, pendidik, pengusaha, keagamaan, dsb. Inti usulan ini adalah pembasisan wakil rakyat dengan basis-basis kerakyatan yang selama ini gagal dilakukan oleh partai politik. Mekanisme penghidupan kembali "utusan golongan" ini dilakukan melalui penggantian sistem pemilu mekanik menjadi organik. Pada sistem mekanik, peserta pemilu hanya partai politik. Sementara pada sistem organik, ditambah dengan NGO atau LSM sebagai representasi "utusan golongan".

Mekanisme kedua dari demokrasi deliberatif Pancasila ini adalah penciptaan prosedur politik baru yang menegakkan "demokrasi langsung" di dalam "demokrasi perwakilan". Penegakan "demokrasi langsung", di mana rakyat terlibat langsung di dalam perumusan kebijakan tanpa diwakili partai politik sebenarnya telah terjadi melalui ruang publik di media massa. Misalnya di dalam debat publik di televisi yang menghadirkan pakar, pengamat, atau subjek dari kasus tertentu, untuk dikonfrontir dengan pengambil kebijakan. Di dalam ruang publik media, negara dan rakyat dipertemukan sehingga kebijakan politik bisa dikonfirmasi langsung oleh rakyat. Hanya saja mekanisme ini masih terbatas di ruang publik, luar negara. Yang dibutuhkan adalah pemasukan ruang publik ini ke dalam negara. Tentu pada titik

ini dibutuhkan ijtihad politik untuk merumuskan prosedur baru, di mana semua kebijakan publik besutan parlemen dan pemerintah belum absah ketika belum dikonsultasikan dengan rakyat, pemilik kedaulatan.

Model *demokrasi permusyawaratan Pancasila* yang dibasiskan pada tradisi demokrasi deliberatif ini merupakan "kaki-tangan" yang mewujudkan ideal falsafah *ketuhanan yang berkebudayaan*. Dengan demikian, "tubuh Pancasila" dibagi dua bagian. Bagian "otak-hati" terdapat di dalam prinsip *ketuhanan yang berkebudayaan*. Prinsip ini kemudian ditetapkan sebagai *Weltanschauung* Pancasila, ketika Pancasila itu sendiri merupakan *Weltanschauung* bangsa. Artinya, segenap sila, nilai, dasar hukum, etika politik, dan norma kebangsaan yang lahir dari Pancasila merupakan nilai-nilai yang lahir dari prinsip *ketuhanan yang berkebudayaan*. Jadi, ketuhanan umat beragama di Indonesia haruslah berkebudayaan dalam arti berkemanusiaan dan berkeadilan. Kemanusiaan itu sendiri haruslah berketuhanan sehingga tidak terjebak dalam humanisme ateis. Hal serupa pada demokrasi yang berketuhanan sehingga melalui Pancasila, demokrasi tidak bisa dipertentangkan dengan "daulat Tuhan", sebab ia merupakan *teo-demokrasi*, demokrasi berketuhanan.

Berdasarkan prinsip etis dari *demokrasi permusyawaratan* ini, buku ini telah melancarkan kritik kebudayaan, baik pada ranah politik maupun kritik atas entropi Pancasila. Pada ranah politik, Pancasila merupakan lawan bagi in-

strumentalisme politik, sebab kedaulatan rakyat diarahkan tidak demi keuntungan individu tiap politikus, tetapi demi rakyat itu sendiri berdasarkan hikmah/kebijaksanaan yang diterangi oleh prinsip *ketuhanan yang berkebudayaan*. Kritik ini kemudian mempraksis di dalam pembentukan demokrasi deliberatif di Indonesia yang ingin keluar dari model konvensional demokrasi prosedural kita, menuju demokrasi substantif melalui penciptaan prosedur-prosedur baru yang deliberatif. Yang diusulkan buku ini adalah radikalisasi demokrasi melalui radikalisasi prosedur-prosedur demokrasi. *Demokrasi permusyawaratan* yang menolak prinsip mayorokrasi (*majority rule*) dan minorokrasi (oligarki), menurut penulis merupakan model demokrasi yang selaras dengan demokrasi deliberatif (musyawarah), bukan yang lainnya.

Kritik politik perspektif Pancasila ini pada akhirnya terarah pada kritik atas entropi Pancasila. Yang dimaksud sebagai entropi adalah situasi patologis, ketika sebagai nilai, Pancasila hanya menjadi simbol yang tak dipahami maknanya. Ibarat pertunjukan drama, Pancasila seharusnya menjadi skenario yang menentukan alur drama di panggung. Sayangnya, akibat *perubahan basis material kebudayaan* di atas, Pancasila tidak lagi menjadi skenario atau pertunjukan, tetapi hanya menjadi "hiasan dekoratif" di atas panggung. Ini merupakan situasi entropis yang membuat Pancasila "tidak bekerja" di panggung kenyataan.